

## **Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

**Gusti Ayu Givsa Inge Ansersa Putri<sup>1</sup>, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang  
e-mail: Gustiayugivsa@gmail.com

<sup>2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang  
e-mail: Octaviaoivi@untidar.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to examine the effectiveness and efficiency of budget implementation in regional expenditures at BPKAD Magelang City. This research method is a qualitative method, the data collection in this study was carried out through literature and documentation studies, the type of data analysis used was qualitative by using a budget realization report at the BPKAD Magelang City and various information related to the Magelang City BPKAD. The results of the analysis show that regional expenditures at the BPKAD of Magelang City in 2016-2019 vary. The highest level of effectiveness was in 2019 and the lowest was in 2017. The implementation of the 3 year budget from 2016 to 2018 was quite effective, and in 2019 it was said to be effective because the budgeted activities had been implemented and realized as expected. The implementation of the 2016 regional budget is less efficient where the percentage is between 90%-100%, then in 2017-2018 there was an increase from the criteria quite effective to be effective and in 2018-2019 there was a decrease from the effective criteria down to quite effective*

**Keywords :** *Effectiveness, Efficiency, Regional Budget*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas serta efisiensi pelaksanaan anggaran dalam belanja daerah pada BPKAD Kota Magelang. Metode penelitian ini metode deskriptif kualitatif pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, jenis analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan laporan realisasi anggaran belanja pada BPKAD Kota Magelang dan berbagai informasi terkait BPKAD Kota Magelang. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah pada BPKAD Kota Magelang tahun 2016-2019 bervariasi. Tingkat efektivitas yang paling tinggi pada tahun 2019 dan paling rendah tahun 2017. Pelaksanaan pada anggaran belanja selama 3 tahun dari 2016 sampai 2018 cukup efektif dan pada tahun

2019 dikatakan efektif karena kegiatan yang dianggarkan telah dilaksanakan dan terealisasi sesuai dengan harapan. Pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun 2016 kurang efisien yang mana presentase ada diantara 90%-100%, kemudian pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dari kriteria cukup efektif menjadi efektif dan tahun 2018-2019 terjadi penurunan dari kriteria efektif turun menjadi cukup efektif

**Kata kunci :** Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja Daerah

## PENDAHULUAN

Akuntansi digunakan dalam Lembaga Pemerintahan di Indonesia memiliki tujuan sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat umum disebut Akuntansi Sektor Publik. Pengertian diatas menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik diminta untuk fokus pada kualitas profesionalisme dan *value for money*, salah satunya dengan melaksanakan anggaran belanja daerah. Dalam Lembaga Pemerintahan Keuangan Daerah secara umum anggaran merupakan perencanaan operasional keuangan daerah yang dapat menggambarkan dua sisi yaitu menggambarkan penerimaan pemasukan daerah dan menggambarkan pengeluaran guna membiayai belanja rutin serta belanja pembangunan wilayah periode satu tahun anggaran. Menurut Yunina (2018) setiap sisi anggaran menjadi perhatian publik, namun yang cenderung menjadi perhatian publik yaitu sisi pengeluaran karena menyangkut kinerja pemerintah pada saat memberikan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan daerah sering disebut dengan anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah ini berkaitan dengan penentuan besaran pada alokasi dana di suatu program serta kegiatan dengan menggunakan dana masyarakat. Anggaran ini sebagai alat pengendalian juga perencanaan. Anggaran ini untuk merencanakan target-target pemerintah dan juga untuk mengontrol alokasi dana yang telah disepakati pihak legislatif untuk dibelanjakan. Menurut Rampengan (2016) suatu organisasi sektor publik dikatakan baik jika telah melakukan tugas dan mencapai tujuan dengan standar maksimal namun biayanya rendah. Untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah dengan cara mengurangi tingkat pengangguran yang

semakin pesat serta megurangi tingkat kemiskinan penduduk maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien dan *value for money*.

Akuntansi Sektor Publik menurut Sujarweni (2015:1) definisi dari akuntansi sektor publik merupakan semua kegiatan dari pencatatan kemudian mengklarifikasi serta pelaporan pada suatu transaksi ekonomi yang hasilnya akan mengeluarkan sebuah informasi keuangan untuk pihak terkait, yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian menurut Mardiasmo (2018:2) menyatakan bahwa dalam akuntansi sektor publik berkaitan terhadap penerapan serta perlakuan akuntansi yang ada dalam lingkup publik. Domain publik ini terdiri dari badan pemerintahan yaitu seperti pemerintah pusat serta daerah dan juga unit kerja pemerintah, kemudian Yayasan, Organisasi Massa dan Politik, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan Milik Negara seperti BUMN dan BUMD.

Sumenge (2013) menyatakan hak serta kewajiban suatu daerah pada pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang berbentuk uang dan segala macam kekayaan lain disebut Keuangan Daerah. Arti daerah disini yaitu pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang didukung oleh PP No 58 tahun 2005 yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah. NKRI terbagi menjadi daerah provinsi, kemudian provinsi dibagi menjadi 2 yaitu kota dan kabupaten, kemudian kota dan kabupaten memiliki sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas daerahnya yaitu pemerintahan daerah yang diatur dalam perundang-undangan, tertulis pada UUD 1945 Pasal 18. Dalam skema sistem Pemerintahan di Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki kedudukan di bawah Pemerintah Pusat yang artinya Pemerintah Pusat serta daerah memiliki hubungan keterkaitan sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara saling berkaitan.

Menurut Bahtiar (2011:123) anggaran merupakan rencana suatu aktivitas yang dapat diukur dengan uang tentang perkiraan belanja pada satu periode untuk membiayai belanja tersebut. Definisi lain menyatakan bahwa anggaran adalah suatu

pernyataan tentang perkiraan kinerja dalam periode satu waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk ukuran keuangan.

Menurut Rampengan (2016) perbandingan antara anggaran serta realisasi dalam suatu laporan di periode tertentu yang memberikan sebuah informasi berkaitan dengan sejauh mana target yang tercapai yang disepakati dan sesuai undang-undang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan Realisasi Anggaran tertuang tentang semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka menyajikan ringkasan sumber, alokasi, serta penggunaan pada sumber daya ekonomi yang ada dalam satu periode tertentu.

Paat (2019) menyatakan belanja daerah dapat untuk membiayai segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan serta pelaksanaan tugas organisasi isi dari UU. No. 23 Tahun 2014. Meninjau hal ini semua sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan, klasifikasi belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah terdiri atas 2 bagian/kelompok, yaitu:

1. Kegiatan belanja telah dianggarkan tetapi tidak berkaitan secara langsung pada pelaksanaan suatu kegiatan yaitu belanja tidak langsung. Yang termasuk dalam belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai tidak langsung berbentuk gaji serta tunjangan atau penghasilan lain menurut undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bagi hasil, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Kegiatan belanja telah dianggarkan berkaitan secara langsung terhadap suatu kegiatan yaitu belanja langsung. Yang termasuk dari belanja langsung yaitu belanja pegawai dalam bentuk upah dan honorarium, belanja barang dan jasa, serta belanja modal

Menurut Dien (2015) efektivitas yaitu sebuah hubungan dari keluaran kemudian tujuan serta sasaran yang ingin diperoleh. Kegiatan operasional akan efektif jika tujuan dalam kegiatan tersebut tercapai serta sasaran kebijakan diakhir

(*Spending Wisdom*). Efektivitas pada hakekatnya menyangkut pada pencapaian tujuan serta menyangkut sasaran kebijakan.

Efisiensi dapat diukur melalui cara membandingkan hasil dari output dengan input yang telah digunakan. Sari (2018) menyatakan suatu kegiatan dikatakan efisien jika dalam suatu pekerjaan dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya rendah dan dana sangat rendah. Rasio efisiensi dalam belanja daerah memiliki manfaat yaitu menghitung seberapa besar anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Pelaksanaan anggaran belanja dikatakan berhasil jika rasionya lebih kecil dari 100% dan apabila melebihi 100% menunjukkan adanya pemborosan dalam anggaran.

Penelitian dengan topik ini telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang telah dipaparkan oleh H P. Paat, G B. Nangoi, R J. Pusung (2019) bahwa pelaksanaan anggaran belanja daerah Kota Tomohon selama 3 tahun mulai dari 2015 sampai 2017 terdapat peningkatan serta penurunan yaitu pada 2015 mencapai 93,44% artinya masuk dalam kriteria efektif, kemudian pada 2016 dan 2017 mencapai 84,45% dan 85,68% artinya masuk dalam kriteria cukup efektif, maka hasil dari penelitian ini masuk dalam kategori efektif menjadi cukup efektif. Dalam penelitian Sumenge (2013) pelaksanaan dalam anggaran belanja daerah dari 5 tahun mulai dari 2008 sampai 2012 kecuali tahun 2011 mencapai kriteria efektif, namun tahun 2011 tingkat efektivitasnya tidak maksimal karena realisasi anggarannya jauh dengan target yang telah dianggarkan. Sehingga anggaran belanja daerah pada 2008 sampai 2011 mencapai kategori sangat efisien, tetapi pada 2012 mencapai kategori efisien. Pada penelitian Rampengan (2016) menunjukkan efektifitas pada anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kota Manado dari 2011 sampai dengan 2015 memiliki kategori yang cukup bervariasi. Kategori cukup efektif terjadi pada 2015 dan 2014, kemudian tiga tahun berturut dari 2011 sampai 2013 termasuk pada kategori yang kurang efektif, karena realisasi pada anggaran belanja daerah jauh berbeda dari target anggaran yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya BAPPEDA Kota Manado tahun 4 tahun

berturut-turut secara keseluruhan telah mencapai kriteria terproses secara efisien. Sehingga anggaran belanja daerah pada 2011 sampai 2015 mencapai kategori sangat efisien, tetapi pada 2014 mencapai kriteria efisien.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini metode deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan mendeskripsikan serta menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Efektivitas} = \frac{RAB}{TAB} \times 100\%$$

RAB : Realisasi Anggaran Belanja

TAB : Target Anggaran Belanja

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kategori tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan  $\geq 100\%$ , maka dikategorikan sangat efektif
2. Jika diantara 90% - 100%, maka dikategorikan efektif
3. Jika diantara 80% - 90%, maka dikategorikan cukup efektif
4. Jika diantara 60% - 80%, maka dikategorikan kurang efektif
5. Jika  $\leq 60\%$ , maka dikategorikan tidak efektif

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja

$$\text{Efisiensi} = \frac{RAB \text{ Langsung}}{RAB} \times 100\%$$

RAB : Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan  $\geq 100\%$ , maka dikategorikan tidak efisien
2. Jika diantara  $90\% - 100\%$ , dikategorikan kurang efisien
3. Jika diantara  $80\% - 90\%$ , dikategorikan cukup efisien
4. Jika diantara  $60\% - 80\%$ , dikategorikan efisien
5. Jika  $\leq 60\%$ , dikategorikan sangat efisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BPKAD Kota Magelang mempunyai tugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tugas BPKAD melaksanakan beberapa pelayanan seperti pelayanan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan penganggaran daerah, pelayanan pencairan dana, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, dan pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan dalam kebijakan teknis
2. Melaksanakan tugas dukungan secara teknis
3. Melakukan pemantauan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas
4. Melakukan pembinaan teknis untuk penunjang urusan pemerintah daerah
5. Melaksanakan fungsi lain

Hasil Penelitian dari Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Daerah selama periode anggaran 2016-2019, memiliki efektivitas yang berfluktuasi dari tiap tahunnya terkadang menurun, terkadang meningkat. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 85,68% mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 3,93% menjadi 81,75%. Kemudian mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2018 sebesar 6,14% menjadi 87,89%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat lagi sebesar 3,13% menjadi 91,02%. Secara keseluruhan dari tahun 2016 hingga 2019, tingkat efektivitas anggaran belanja dalam LRA pada BPKAD Kota Magelang memiliki tren yang berubah, terkadang meningkat namun terkadang menurun.



Tahun 2016 sampai 2018 dalam kategori cukup efektif, pada 2019 menunjukkan kategori efektif dengan persentase yaitu 91,02%. Terlihat dari perhitungan konsep perhitungan efektivitas anggaran belanja daerah seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah:

**Table1.** Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2016	1.017.467.369.000	871.859.130.603	85,68	Cukup Efektif
2017	1.075.623.121.000	879.408.181.447	81,75	Cukup Efektif
2018	1.066.383.927.000	937.339.746.423	87,89	Cukup Efektif
2019	1.093.001.723.000	994.945.773.787	91,02	Efektif

Kemudian dari hasil analisis tingkat efisiensi anggaran belanja daerah terlihat bahwa tingkat efisiensi dalam anggaran belanja pada BPKAD Kota Magelang mengalami fluktuasi. Pada 2016 mencapai tingkat efisiensi sebesar 99,30% menjadi 81,21% di 2017. Kenaikan ini pada tingkat efisiensi yang cukup besar sebesar 18,09% artinya cukup efisien. Selanjutnya 2018 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,62% dari 81,21% menjadi 79,59% dalam kategori efisien. Tahun 2019 mengalami penurunan tingkat efisiensi dari 79,59% pada tahun 2018 menjadi 81,40% di tahun 2019 dan mempunyai kriteria cukup efisien. Secara garis besar, anggaran belanja dalam LRA pada BPKAD Kota Magelang 2016 sampai 2019 cukup efisien. Hanya pada tahun 2016 tingkat efisiensi berada dikisaran 90%-100% yang memiliki kriteria kurang efisien. Kemudian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sudah cukup efisien dengan tingkat hasil pencapaian dikisaran 80%-90% pada tahun 2017 kemudian sudah efisien pada tahun 2018 dengan tingkat hasil pencapaian dikisaran 70%-80% dan kembali lagi pada tingkat hasil pencapaian dikisaran 80%-90% yang memiliki kriteria cukup efisien di tahun 2019. Terlihat dari perhitungan konsep efisiensi anggaran belanja daerah seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah:



**Table2.** Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2016	865.831.260.103	871.859.130.603	99,30	Kurang Efisien
2017	714.238.246.917	879.408.181.447	81,21	Cukup Efisien
2018	746.061.328.783	937.339.746.423	79,59	Efisien
2019	809.951.064.357	994.945.773.787	81,40	Cukup Efisien

## KESIMPULAN

Kesimpulan hasil analisis penelitian diatas yaitu Tingkat dan kriteria efektivitas dalam anggaran belanja dalam LRA pada BPKAD Kota Magelang tahun 2016-2019 bervariasi. Tingkat efektivitas yang terbaik adalah tahun 2019 dan terendah pada tahun 2017. Anggaran tahun 2016, 2018 dan 2019 sering dikatakan efektif namun pada 2017 tingkat efektivitasnya menurun walaupun dalam kategori cukup efektif karena terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan. Namun, kegiatan lain yang telah dianggarkan terlaksana dengan efektif. Kemudian efisiensi Anggaran Belanja dalam LRA pada BPKAD Kota Magelang Tahun 2016 – 2019 secara keseluruhan cukup efisien. Hanya saja anggaran belanja tahun 2016 ada pada kategori kurang efisien kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada pada kategori cukup efisien dan efisien. Ini disebabkan karena program program yang memiliki nilai prioritas telah terlaksanakan dengan cukup baik. Yang artinya dalam pengelolaan anggaran belanja telah mencapai kategori efisien dimana menggunakan dana minimum untuk mencapai hasil maksimum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bahtiar Arif, M. I. (2011). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- Dien, A. d. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *EMBA*, 534-541.
- Dien, A. N., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG. *EMBA*, 534-541.

- MAGELANG, B. K. (t.thn.). *magelangkota*. Diambil kembali dari bpkad.magelangkota.go.id: <http://bpkad.magelangkota.go.id/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON. *EMBA*, 2979 – 2988.
- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2014 - 2019 PADA PEMKO TEBING TINGGI. *Management, Accounting, Economic and Business*, 142-150.
- Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MANADO. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 616-623.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *feb.unmul*, 38-43.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumenge, A. S. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. *EMBA*, 74-81.
- Trianto, A. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG. *ISSN*, 65-77.
- Untari, R. (2011). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG. *ISSN*.
- Yunina, F., & Jumiati. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH TENGAH. *AKUNTANSI MUHAMMADIYAH*, 1-12.